

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 118 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara: menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;

3. Asas Kepentingan Umum: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan: membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionalitas: mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas: mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi: berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektifitas: berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan: setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Proses dan tahapan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 di Kabupaten Malang, berdasarkan:

1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019, perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
3. Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Pebruari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019, perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.

Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

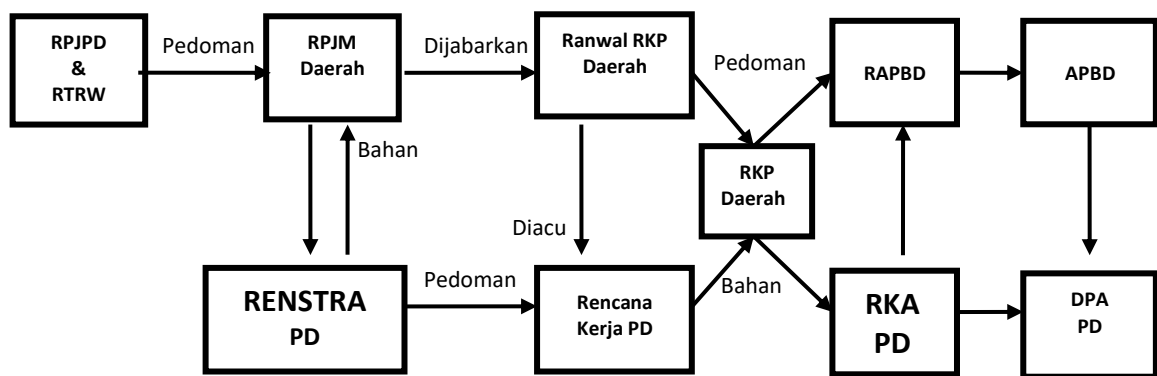
Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang tahun berjalan.

Untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020, telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/206/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
25. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/719/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/627/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/206/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai dan kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. sebagai bahan evaluasi kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN
LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan
Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp6.074.609.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.706.712.260,00 atau sebesar 28,10%.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun 2019
PD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9,100 buah	2200 buah	2250 buah	3651 buah	162,27	2300 buah	8101 buah	89,02
2.07.2.07.01.01.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	2,108 OB	363 ob	363 ob	363 ob	100,00	363 ob	726 ob	51,00
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	10076 jenis	1931 jenis	1525 jenis	1525 jenis	100,00	1940 Jenis	5396 Jenis	53,55
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 jenis	32680 jenis	1525 jenis	1525 jenis	100,00	32700 Jenis	Jenis	204,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	270 jenis	40 jenis	45 jenis	45 jenis	100,00	50 Jenis	135 Jenis	50,00
2.07.2.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	9,420 Jenis	1584 jenis	1584 jenis	1584 jenis	100,00	1584 Jenis	3168 Jenis	50,00
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	89640 hok	12084 hok	14940 hok	14940 hok	100,00	12090 hok	39114 hok	43,63
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	870 hok	148 hok	423 hok	423 hok	100,00	150 hok	721 hok	82,87
2.07.2.07.01.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2550 hok	418 hok	565 hok	565 hok	100,00	425 hok	1408 hok	55,21
2.07.2.07.01.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	8 unit	0 unit	4 unit	4 unit	100,00	1	5 unit	62,50
2.07.2.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	84 jenis	14 jenis	28 jenis	28 jenis	100,00	16 Jenis	58 Jenis	69,04
2.07.2.07.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	96 unit	15 unit	16 unit	16 unit	100,00	17 Unit	48 Unit	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	150 jenis	14 jenis	25 jenis	25 jenis	100,00	28 jenis	67 jenis	44,66
2.07.2.07.01.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.03.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	318 Stel	53 Stel	108 Stel	108 Stel	100,00	54 Stel	215 Stel	67,61
2.07.2.07.01.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	150 orang	25 orang	35 orang	35 orang	100,00	6 orang	66 orang	44,00
2.07.2.07.01.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	52 Buku	9 Buku	12 Buku	12 Buku	100,00	12 Buku	30 Buku	57,69

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I (Buku)	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100,00	1 Buku	3 Buku	60,00
2.07.2.07.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00	1 Buku	3 Buku	60,00
2.07.2.07.01.06	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.06.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	378 Desa	57 Desa	41 Desa	41 Desa	100,00	269	367 Desa	97,08
		Jumlah Pelatihan Penataan Pemerintahan Desa	2.268 Desa	57 Desa	378 Desa	378 Desa	100,00	378 Desa	813 Desa	35,84
		Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	2.340 Ds/Kel	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	390 Ds/Kel	100,00	390 Ds/Kel	1.170 Ds/Kel	50,00
		Jumlah desa berprestasi tingkat Kabupaten	20 Desa	3 Desa	4 Desa	4 Desa	100,00	4 Desa	11 Desa	55,00
2.07.2.07.01.06.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	2.268 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	100,00	378 Desa	813 Desa	35,84
2.07.2.07.01.06.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	2.268 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	100,00	378 Desa	813 Desa	35,84

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.07	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.07.01	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	156 desa	26 desa	26 desa	26 desa	100,00	26 Desa	78 Desa	56,00
2.07.2.07.01.07.02	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah pembinaan lembaga adat desa	198 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	100,00	10 Kec	76 Kec.	38,38
2.07.2.07.01.07.03	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	198 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	100,00	33 Kec.	99 Kec.	50,00
2.07.2.07.01.08	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan Pengembangan Potensi Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.08.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	48 desa	8 desa	16 desa	16 desa	100,00	8 Desa	32 Desa	66,66
2.07.2.07.01.08.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	24 Desa	4 desa	7 desa	7 desa	100%	4 Desa	15 Desa	62,50
2.07.2.07.01.08.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	6 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	0 Unit	3 Unit	50,00
		Jumlah Desa pemanfaat / penerima bantuan peralatan TTG	48 Desa	8 Desa	12 Desa	12 Desa	100%	12 Desa	20 Desa	41,66

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
2.07.2.07.01.09	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.2.07.01.09.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	75 Desa	5 Desa	12 Desa	12 Desa	100%	14 Desa	22 Desa	29,33
2.07.2.07.01.09.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	26 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	4 Desa	4 Desa	45,00
2.07.2.07.01.09.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 Desa	14 Desa	-	-	-	-	14 Desa	96,00
		Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat	198 Desa	33 Desa	36 Desa	36 Desa	100%	33 Desa	102 Desa	51,51

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membantu pengembangan kemampuan masyarakat yang lemah, rentan miskin, marginal dan kaum muda pencari kerja serta kelompok perempuan agar mereka bisa lebih mandiri, maka orientasi pemberdayaan masyarakat juga diarahkan kepada masyarakat perdesaan dengan menggunakan strategi pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need approach*), pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*), pengorganisasian dan pelebagaan masyarakat (*community institutional approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (*prosperity approach*), pendekatan lintas sektoral dan program (*cross sectoral program approach*), pendayagunaan teknologi tepat guna (*appropriate technology approach*) serta pemberdayaan masyarakat perkotaan dan perdesaan (*rural and urban community approach*).

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang saat ini masih relatif tinggi, hal ini membawa konsekwensi logis bahwa sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi cukup besar pula, kondisi ini diperberat dengan kondisi geografis kabupaten Malang mengharuskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelembagaannya.

Dengan sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana yang ada serta dukungan anggaran, maka dapat digambarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
	Eselon II : Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju			4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	10 Desa	-	4 Desa	4 Desa	
1	Eselon III : Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon IV : Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)			2300 buah	2300 buah	2350 buah	2400 buah	3651 buah	-	2350 buah	2400 buah	
	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)			363 OB	363 OB	363 OB	363 OB	363 OB	-	363 OB	363 OB	
	Jumlah petugas kebersihan (OB)			1 OB	1 OB	1 OB	1 OB	1 OB	-	1 OB	1 OB	
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)			1,935 Jenis	1,940 Jenis	1,945 Jenis	1950 jenis	1,935 Jenis	-	1,945 Jenis	1950 jenis	
	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)			1525 jenis	32,700 Jenis	32,710 Jenis	32.720 jenis	1525 jenis	-	32,710 Jenis	32.720 jenis	
	Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis)			48 Jenis	50 Jenis	55 Jenis	60 jenis	48 Jenis	-	55 Jenis	60 jenis	

No	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)			1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	1,584 Jenis	-	1,584 Jenis	1,584 Jenis	
	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)			12,084 HOK	12,090 HOK	12,090 HOK	12,090 HOK	12,084 HOK	-	12,090 HOK	12,090 HOK	
	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)			148 HOK	150 HOK	155 HOK	160 HOK	148 HOK	-	155 HOK	160 HOK	
	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)			418 HOK	425 HOK	450 HOK	475 HOK	477 HOK	-	450 HOK	475 HOK	
2	Eselon III : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon IV : Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)			4 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	4 Unit	-	2 Unit	1 Unit	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)			10 Jenis	16 Jenis	17 Jenis	18 Jenis	10 Jenis	-	17 Jenis	18 Jenis	
	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)			17 Unit	17 Unit	18 Unit	19 Unit	17 Unit	-	18 Unit	19 Unit	
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			28 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	28 Jenis	-	30 Jenis	30 Jenis	
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)			-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	-	-	1 Jenis	1 Jenis	

No	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
3	Eselon III : Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon IV : Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)			108 Stel	53 Stel	53 Stel	53 Stel	108 Stel	-	53 Stel	53 Stel	
	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)			-	53 Stel	53 Stel	53 Stel	-	-	53 Stel	53 Stel	
4	Eselon III : Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon IV : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	
5	Eselon III : Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon IV : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)			9 Buku	9 Buku	9 Buku	9 Buku	12 Buku	-	12 Buku	12 Buku	
	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I			1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	-	1 Buku	1 Buku	
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)			1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	-	1 Buku	1 Buku	

No	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	6	7	8		9	10	11	12	13
6	Eselon III : Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Eselon IV : Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.			57 Desa	-	307 Desa	12 Desa	57 Desa	-	307 Desa	12 Desa	
	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa			57 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	57 Desa	-	378 Desa	378 Desa	
	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang-undangan desa			378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	-	378 Desa	378 Desa	
	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid			390 Ds/Kel.	390 Ds/Kel.	390 Ds/Kel.	390 Ds/Kel.	390 Ds/Kel.	-	390 Ds/Kel.	390 Ds/Kel.	
	Jumlah desa berprestasi tingkat Kabupaten			3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	-	3 Desa	3 Desa	
	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa			378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	-	378 Desa	378 Desa	
	Jumlah aset desa yang didata			378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	378 Desa	-	378 Desa	378 Desa	
7	Eselon III : Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa			50%	66,67 %	83,33 %	100%	50%	66,67 %	83,33 %	100%	
	Eselon IV : Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K			26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	26 Desa	-	26 Desa	26 Desa	
	Jumlah pembinaan lembaga adat desa			4 Kec.	10 Kec.	15 Kec	15 Kec.	4 Kec.	-	15 Kec	15 Kec.	

No	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -				Realisasi Capaian Tahun Ke -		Proyeksi Tahun Ke -		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.			33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.	33 Kec.		33 Kec.	33 Kec.	
9.	Eselon III : Persentase peningkatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.			36%	54,67%	76%	100%	36%	54,67%	76%	100%	
	Eselon IV : Jumlah BUMDesa yang dibentuk.			12 Desa	14 Desa	16 Desa	18 Desa	12 Desa	-	16 Desa	18 Desa	
	Jumlah pelatihan usaha sektor informal			4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	-	4 Desa	4 Desa	
	Jumlah pelatihan usaha sektor informal (Jalin Matra)			82 Desa	41 Desa			82 Desa	-			
	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat			33 Kec	33 Kec	33 Kec	33 Kec	33 Kec	-	33 Kec	33 Kec	
10.	Eselon III : Persentase peningkatan pengembangan Sumber Daya Desa			44.19%	62.79%	81.4%	100%	44.19%	62.79%	81.4%	100%	
	Eselon IV : Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan			16 Desa	8 Desa	8Desa	8 Desa	16 Desa	-	8Desa	8 Desa	
	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa			5 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	5 Desa	-	4 Desa	4 Desa	
	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang			-	115 desa	127 desa	140 desa	-	-	127 desa	140 desa	
	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG			12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	-	12 unit	12 unit	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1 Peluang

- Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Malang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Regulasi tentang pemberdayaan masyarakat baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah;
- Dukungan dari Perguruan Tinggi/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.3.2 Tantangan

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
- Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin;
- Luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Malang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah telah disusun pada akhir tahun sebelum awal tahun kegiatan berjalan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi dan kondisi, maka Rancangan Kerja Pemerintah Daerah tersebut perlu mendapatkan review. Adapun review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Review terhadap RKPD Tahun 2020
Kabupaten Malang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kabutuhan Dana Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.418.127.000,00	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.418.127.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6500 buah	13.230.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMD	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6500 buah	13.230.000,00	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPMD	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	578.967.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	DPMD	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	578.967.000,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMD	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	23.814.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	DPMD	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	23.814.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1945 jenis	66.150.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DPMD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1945 jenis	66.150.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1535 jenis	22.213.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1535 jenis	22.213.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	55 jenis	2.800.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	55 jenis	2.800.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 jenis	5.953.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMD	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 jenis	5.953.000,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPMD	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	11000 hok	205.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	DPMD	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	11000 hok	205.000.000,00	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	460 hok	265.000.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	460 hok	265.000.000,00	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	650 hok	235.000.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	DPMD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	650 hok	235.000.000,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DPMD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	190.090.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	DPMD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	190.090.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	27.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	27.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 jenis	68.238.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 jenis	68.238.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	18 unit	46.834.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMD	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	20 unit	46.834.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	21.018.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DPMD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	21.018.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPMD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	27.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DPMD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	27.000.000,00	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	DPMD	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	56.148.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	DPMD	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	56.148.000,00	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	55 Stel	29.000.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	55 Stel	29.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	55 stel	27.148.000,00	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	DPMD	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	55 stel	27.148.000,00	
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	DPMD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2.756.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	DPMD	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2.756.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMD	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	30 orang	2.756.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMD	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	30 orang	2.756.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	DPMD	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	122.883.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	DPMD	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	122.883.000,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	110.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	110.000.000,00	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	4.900.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	4.900.000,00	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	7.983.000,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DPMD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	7.983.000,00	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.		Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	83.33%	595.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.		Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	83.33%	595.000.000,00	
	Pengembangan Lembaga Adat	33 Kec.	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	10 Kec.	190.000.000,00	Pengembangan Lembaga Adat	33 Kec.	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	10 Kec.	190.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	33 kec	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	220.000.000,00	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	33 kec	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	220.000.000,00	
	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	378 desa	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	185.000.000,00	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	378 desa	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	185.000.000,00	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT		Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	76.00%	534.625.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT		Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	76.00%	534.625.000,00	
	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	378 desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	16 desa	220.500.000,00	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	378 desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	16 desa	220.500.000,00	
	Pengembangan Usaha Sektor Informal	16 Desa	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	135.000.000,00	Pengembangan Usaha Sektor Informal	16 Desa	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	135.000.000,00	
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	33 Kec.	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	124.000.000,00	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	33 Kec.	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	124.000.000,00	
		78 desa	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	55.125.000,00		78 desa	Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	55.125.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA		Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	851.505.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	100%	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	851.505.000,00	
	Penataan Pemerintahan Desa	378 desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 desa	674.000.000,00	Penataan Pemerintahan Desa	378 desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 desa	674.000.000,00	
		15 desa	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	4 desa	175.000.000,00		15 desa	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	4 desa	175.000.000,00	
		390 Desa/Kel.	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	84.000.000,00		390 Desa/Kel.	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	84.000.000,00	
	Penatausahaan Keuangan Desa	378 desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 desa	280.000.000,00	Penatausahaan Keuangan Desa	378 desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 desa	280.000.000,00	
	Penatausahaan Aset Desa	378 desa	Jumlah aset desa yang didata	378 desa	92.000.000,00	Penatausahaan Aset Desa	378 desa	Jumlah aset desa yang didata	2 unit	92.000.000,00	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA		Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	81,40%	674.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA		Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	81,40%	674.000.000,00	
	Pengembangan Kawasan Perdesaan	40 Desa	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	12 desa	182.000.000,00	Pengembangan Kawasan Perdesaan	40 Desa	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	12 desa	182.000.000,00	
	Pengembangan Sumber Daya Desa	30 Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	6 Desa	170.000.000,00	Pengembangan Sumber Daya Desa	30 Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	6 Desa	170.000.000,00	
		378 desa	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang.	131 Desa	93.000.000,00		378 desa	Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang.	131 Desa	93.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	378 Desa	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	2 unit.	112.000.000,00	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	378 Desa	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	2 unit.	112.000.000,00	
			Jumlah Desa pemanfaat / penerima bantuan peralatan TTG	12 Desa	117.000.000,00			Jumlah Desa pemanfaat / penerima bantuan peralatan TTG	12 Desa	117.000.000,00	
	JUMLAH				4.445.134.000,00					4.445.134.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat merupakan usulan pembangunan dari Desa/Kelurahan yang oleh Kecamatan pada forum Musrebangcam dipilih dan ditetapkan sebagai program prioritas untuk diusulkan menjadi program perangkat daerah yang akan dibahas pada forum Musrenbang Kabupaten.

Daftar usulan program dan kegiatan pembangunan dari Kecamatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 9 (Sembilan) usulan sebagaimana tercantum pada aplikasi e-Musrenbang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bumdesa	Desa Genengan Kec. Pakisaji	Menciptakan Manajemen Pengelola Bumdesa yang berkualitas dan mampu meningkatkan perekonomian desa.	1 BUMDesa (SDM Pengelola Bumdesa)	APBD
2	Pelatihan Management Keuangan Bumdesa dan Penyertaan Modal Bumdesa	Desa Sutojayan Kec. Pakisaji	Meningkatnya SDM pengelola BUMDesa	1 Paket	APBD
3	Pelatihan Sablon Kaos Mulai Dasar Sampai Cetak (berkelanjutan)	Desa Sumbermanjing Kec. Sumbermanjing Wetan	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat	30 orang	APBD
4	Pembangunan Pasar Desa	Desa Kedungsalam Dusun Krajan Rt 06 Rw 02 Kec. Donomulyo	20 Kios	6 X 30 m	APBD
5	Pembangunan Pasar Desa	Desa Tlogosari Kec. Donomulyo	1 Titik Lokasi Pasar Desa	1 Titik	APBD
6	Pemberdayaan Bumdesa Wisata	Desa Sidodadi Kec. Gedangan	Penambahan Sarana/fasilitas di Wisata Gua Perawan. Penambahan Kolam Renang dan Kantor Sekretariat Bumdesa	Kolam Renang dan Kantor Sekretariat Bumdesa	APBD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7	Pembangunan Pasar Rakyat	Desa Banjarejo Kec. Ngantang	Revitalisasi 1 Lokasi Pasar Rakyat	1 Lokasi	APBD
8	Penambahan Modal Bumdes	Desa Pakisaji Kec. Pakisaji	Kesejahteraan Masyarakat	1 Paket	APBD
9	Rehab Los Pasar Desa Ampelgading	Desa Ampelgading Kec. Tirtoyudo	Rencana Yang Akan Rehab 25 X 9 M	25 X 9 M	APBD

Dari 9 (sembilan) usulan program dan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 6 (enam) usulan tidak bisa diakomodir karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sedangkan yang 3 (tiga) usulan bisa diakomodir, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun 3 (tiga) usulan bisa diakomodir sebagaimana tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bumdesa	Desa Genengan Kec. Pakisaji	Menciptakan Manajemen Pengelola Bumdesa yang berkualitas dan mampu meningkatkan perekonomian desa.	1 BUMDesa (SDM Pengelola Bumdesa)	APBD
2	Pelatihan Management Keuangan Bumdes dan Penyertaan Modal Bumdesa	Desa Sutojayan Kec. Pakisaji	Meningkatnya SDM pengelola BUMDesa	1 Paket	APBD
3	Pelatihan Sablon Kaos Mulai Dasar Sampai Cetak (berkelanjutan)	Desa Sumbermanjing Kec. Sumbermanjing Wetan	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat	30 orang	APBD

Selain usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbangcam, terdapat usulan yang merupakan pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Malang, sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Usulan Pemekaran Wilayah	Desa Ngelak Kecamatan Pakis	Pemekaran Wilayah	1 desa	APBD
2	Sosialisasi Tentang Dana Desa	Kecamatan Wagir	Sosialisasi tentang Dana Desa	1 Kec.	APBD
3	Bumdesa	Desa Tawangrejeni Turen	Pembinaan Bumdesa	1 desa	APBD
4	Pemberdayaan Karang Taruna	Kab. Malang	Pemberdayaan Karang Taruna	Kab. Malang	APBD
5	Sebagian Perolehan Dana Desa Bengkak Digunakan Untuk Insentif Perangkat Rt/rw	Kab. Malang	Sebagian Perolehan Dana Desa Bengkak Digunakan Untuk Insentif Perangkat RT/RW.	Kab. Malang	APBD
6	Sarana Ambulance	Penanganan Untuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Desa Pandansari	Sarana Ambulance	1 unit	APBD
7	Alat Musik	Karang Taruna Desa Pandansari	Pengadaan Alat Musik	1 set	APBD

Dari 7 (tujuh) usulan pokok-pokok pikiran dari DPRD, 4 (empat) usulan tidak bisa diakomodir karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sedangkan yang 3 (tiga) usulan bisa diakomodir, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun 3 (tiga) usulan bisa diakomodir sebagaimana tabel berikut :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Usulan Pemekaran Wilayah	Desa Ngelak Kecamatan Pakis	Pemekaran Wilayah	1 desa	APBD
2	Sosialisasi Tentang Dana Desa	Kecamatan Wagir	Sosialisasi tentang Dana Desa	1 Kec.	APBD
3	Bumdesa	Desa Tawangrejeni Turen	Pembinaan Bumdes	1 desa	APBD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 pada Misi ke 5, melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pengembangan produk unggulan desa, dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel, maka tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.

Indikator tujuan :

Jumlah desa maju Kabupaten Malang.

b. Sasaran

Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang.

Indikator Sasaran :

Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan, termasuk kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
8. Program Pengembangan Potensi Desa;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah ;
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
12. Pengadaan peralatan gedung kantor;
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
16. Pengadaan pakaian kerja lapangan
17. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ;
18. Pendidikan dan pelatihan formal;
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
20. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
22. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
23. Pembinaan Lembaga Adat;

24. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat;
25. Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat
26. Pengembangan Usaha Sektor Informal
27. Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran;
28. Pengembangan Sumber Daya Desa;
29. Pengembangan Kawasan Perdesaan;
30. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
31. Penatausahaan Keuangan Desa;
32. Penataan Pemerintahan Desa;
33. Penatausahaan Aset Desa.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang untuk program rutin masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	DPMD	100%	1.418.127.000,00		-	100%	1.468.782.000,00	
2.207.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DPMD	6500 buah	13.230.000,00	APBD Kabupaten	-	6600 buah	13.891.000,00	
2.207.21.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	DPMD	363 ob	578.967.000,00	APBD Kabupaten	-	365 ob	607.916.000,00	
2.207.21.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	DPMD	12 ob	23.814.000,00	APBD Kabupaten		12 ob	25.004.000,00	
2.207.21.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	DPMD	1945 jenis	66.150.000,00	APBD Kabupaten	-	1950 jenis	69.457.000,00	
2.207.21.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	DPMD	1535 jenis	22.213.000,00	APBD Kabupaten	-	1550 jenis	23.323.000,00	
2.207.21.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	DPMD	55 jenis	2.800.000,00	APBD Kabupaten	-	60 jenis	2.940.000,00	
2.207.21.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DPMD	4 jenis	5.953.000,00	APBD Kabupaten	-	4 jenis	6.251.000,00	
2.207.21.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	DPMD	11.000 hok	205.000.000,00	APBD Kabupaten	-	11250 hok	210.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.21.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DPMD	460 hok	265.000.000,00	APBD Kabupaten	-	470 hok	270.000.000,00	
2.207.21.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	DPMD	650 hok	235.000.000,00	APBD Kabupaten	-	675 hok	240.000.000,00	
2.207.21.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	190.090.000,00			100%	198.893.000,00	
2.207.21.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	DPMD	1 unit	27.000.000,00	APBD Kabupaten		1 unit	28.000.000,00	
2.207.21.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DPMD	20 jenis	68.238.000,00	APBD Kabupaten		22 jenis	71.650.000,00	
2.207.21.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	DPMD	18 unit	46.834.000,00	APBD Kabupaten		20 unit	49.175.000,00	
2.207.21.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	30 jenis	21.018.000,00	APBD Kabupaten		32 jenis	22.068.000,00	
2.207.21.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	1 jenis	27.000.000,00	APBD Kabupaten		1 jenis	28.000.000,00	
2.207.21.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	56.148.000,00			100%	58.355.000,00	
2.207.21.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	DPMD	55 Stel	29.000.000,00	APBD Kabupaten		56 Stel	30.000.000,00	
2.207.21.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	DPMD	55 stel	27.148.000,00	APBD Kabupaten		56 stel	28.355.000,00	
2.207.21.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	2.756.000,00			100%	2.894.000,00	
2.207.21.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	DPMD	30 orang	2.756.000,00	APBD Kabupaten		35 orang	2.894.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.21.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	122.883.000,00			100%	125.573.000,00	
2.207.21.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	DPMD	12 Buku	110.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Buku	112.000.000,00	
2.207.21.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	DPMD	1 buku	4.900.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	5.191.000,00	
2.207.21.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	DPMD	1 buku	7.983.000,00	APBD Kabupaten		1 buku	8.382.000,00	
2.207.21.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		83.33%	595.000.000,00			100%	615.000.000,00	
2.207.21.06.01	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	33 Kec.	10 Kec.	190.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Kec.	200.000.000,00	
2.207.21.06.02	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 kec	33 Kec.	220.000.000,00	APBD Kabupaten		33 Kec.	225.000.000,00	
2.207.21.06.03	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	378 desa	26 desa	185.000.000,00	APBD Kabupaten		26 desa	190.000.000,00	Mengakomodir kegiatan PUG.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.21.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat		76.00%	534.625.000,00			100%	555.406.000,00	
2.207.21.07.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	378 desa	16 desa	220.500.000,00	APBD Kabupaten		18 desa	231.525.000,00	
2.207.21.07.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	16 Desa	4 desa	135.000.000,00	APBD Kabupaten		5 desa	140.000.000,00	Mengakomodir kegiatan PUG.
2.207.21.07.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	33 Kec.	124.000.000,00	APBD Kabupaten		33 Kec.	126.000.000,00	
		Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	78 desa	16 desa	55.125.000,00	APBD Kabupaten		16 desa	57.881.000,00	
2.207.21.08	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.		100%	851.505.000,00			100%	878.530.000,00	
2.207.21.08.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 desa	378 Desa	220.505.000,00	APBD Kabupaten		378 Desa	231.530.000,00	Mengakomodir kegiatan PUG.
		Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	15 desa	4 Desa	175.000.000,00	APBD Kabupaten		4 Desa	180.000.000,00	
		Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	390 Desa/Kel.	84.000.000,00	APBD Kabupaten		390 Desa/Kel.	88.000.000,00	
2.207.21.08.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 desa	378 Desa	280.000.000,00	APBD Kabupaten		378 Desa	285.000.000,00	
2.207.21.08.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 desa	33 Kec	92.000.000,00	APBD Kabupaten		33 Kec	94.000.000,00	
2.207.21.09	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.		81.40%	674.000.000,00			100%	685.000.000,00	
2.207.21.09.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	40 Desa	12 desa	182.000.000,00	APBD Kabupaten		14 desa	184.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.207.21.09.0 2	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	30 Desa	6 desa	170.000.000,00	APBD Kabupaten		6 desa	172.000.000,00	Mengakomodir kegiatan PUG.
		Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang.	378 desa	131 desa	93.000.000,00	APBD Kabupaten		133 desa	95.000.000,00	
2.207.21.09.0 3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	378 Desa	2 unit	112.000.000,00	APBD Kabupaten		2 unit	114.000.000,00	
		Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	378 desa	12 desa	117.000.000,00	APBD Kabupaten		12 desa	120.000.000,00	
Jumlah					4.445.134.000,00				4.588.433.000,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat teknokratis, top down, buttom up maupun politis. Rencana kerja yang bersifat teknokratis berasal dari rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan target-target kinerja yang akan dicapai selama periode Renstra. Rencana kerja yang bersifat top down, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir program-program dari Instansi Vertikal seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rencana kerja yang bersifat buttom up, merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan dari pemerintah desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan yang dimasukkan pada aplikasi e Musrenbang. Sedangkan Rencana kerja yang bersifat politis merupakan program dan kegiatan perangkat daerah yang mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang.

Pendanaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.207.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.418.127,000,00		
2.207.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	DPMD	6500 buah	13.230.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	DPMD	363 ob	578.967.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	DPMD	12 ob	23.814.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	DPMD	1945 jenis	66.150.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	DPMD	1535 jenis	22.213.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	DPMD	55 jenis	2.800.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	DPMD	4 jenis	5.953.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	DPMD	11.000 hok	205.000.000,00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.207.21.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	DPMD	460 hok	265.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	DPMD	650 hok	235.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	190.090.000,00		
2.207.21.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	DPMD	1 unit	27.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	DPMD	20 jenis	68.238.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	DPMD	18 unit	46.834.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	30 jenis	21.018.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	DPMD	1 jenis	27.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	56.148.000,00		
2.207.21.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	DPMD	55 Stel	29.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	DPMD	55 stel	27.148.000,00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.207.21.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	2.756.000,00		
2.207.21.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	DPMD	30 orang	2.756.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	122.883.000,00		
2.207.21.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	DPMD	12 Buku	110.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	DPMD	1 buku	4.900.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	DPMD	1 buku	7.983.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.06	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan		83.33%	595.000.000,00		
2.207.21.06.01	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	33 Kec.	10 Kec.	190.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.06.02	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	33 Kec.	220.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.06.02	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	378 desa	26 desa	185.000.000,00	APBD Kabupaten	Mengakomodir kegiatan PUG.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.207.21.07	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat		76.00%	534.625.000,00		
2.207.21.07.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	378 desa	16 desa	220.500.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.07.01	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	16 desa	4 desa	135.000.000,00	APBD Kabupaten	Mengakomodir kegiatan PUG.
2.207.21.07.01	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	33 Kec.	124.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	78 desa	16 desa	55.125.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.08	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.		100%	851.505.000,00		
2.207.21.08.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	390 Desa/Kel.	84.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	15 Desa	4 Desa	175.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	378 Desa	220.505.000,00	APBD Kabupaten	Mengakomodir kegiatan PUG.
2.207.21.08.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	378 Desa	280.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.08.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	378 Desa	92.000.000,00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.207.21.09	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.		81,40%	674.000.000,00		
2.207.21.09.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	40 desa	12 desa	182.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.09.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	30 desa	6 desa	170.000.000,00	APBD Kabupaten	Mengakomodir kegiatan PUG.
		Updating Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	378 desa	131 desa	93.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.207.21.09.01	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	378 desa	12 desa	117.000.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	378 desa	2 unit	112.000.000,00	APBD Kabupaten	
Jumlah					4.445.134.000,00		

Tabel 4.2

**Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran per Triwulan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.207.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.418.127,000,00	15%	20%	30%	35%	
2.207.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6500 buah	13.230.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	578.967.000,00	25%	25%	25%	25%	
2.207.21.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	23.814.000,00	25%	25%	25%	25%	
2.207.21.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1945 jenis	66.150.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1535 jenis	22.213.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	55 jenis	2.800.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 jenis	5.953.000,00	25%	25%	25%	25%	
2.207.21.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	11.000 hok	205.000.000,00	10%	20%	30%	40%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.207.21.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	460 hok	265.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	650 hok	235.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	190.090.000,00	10%	25%	30%	35%	
2.207.21.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	27.000.000,00	-	100%	-	-	
2.207.21.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 jenis	68.238.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	18 unit	46.834.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	21.018.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	27.000.000,00	-	50%	50%	-	
2.207.21.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	56.148.000,00	-	50%	50%	-	
2.207.21.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	55 Stel	29.000.000,00	-	100%	-	-	
2.207.21.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	55 stel	27.148.000,00	-	-	100%	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.207.21.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	2.756.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	30 orang	2.756.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	122.883.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	110.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	4.900.000,00	-	-	100%	-	
2.207.21.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	1 buku	7.983.000,00	-	-	-	100%	
2.207.21.06	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	83.33%	595.000.000,00	10%	20%	35%	35%	
2.207.21.06.01	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	10 Kec.	190.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.06.02	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah swadaya masyarakat.	33 Kec.	220.000.000,00	20%	30%	30%	20%	
2.207.21.06.02	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	185.000.000,00	10%	30%	40%	20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.207.21.07	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	76.00%	534.625.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.07.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	16 desa	220.500.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.07.01	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	135.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.07.01	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	124.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
		Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	55.125.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.08	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	851.505.000,00	10%	20%	35%	35%	
2.207.21.08.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	84.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
		Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	4 Desa	175.000.000,00	30%	40%	20%	10%	
		Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	220.505.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.08.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	280.000.000,00	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.08.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	92.000.000,00	10%	20%	30%	40%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.207.21.09	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.		81,40%	10%	20%	35%	35%	
2.207.21.09.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	40 desa	12 desa	10%	20%	30%	40%	
2.207.21.09.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	30 desa	6 desa	10%	20%	30%	40%	
		Updating Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	378 desa	131 desa	20%	30%	40%	10%	
2.207.21.09.01	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa pemanfaat / penerima bantuan peralatan TTG	378 desa	12 desa	10%	20%	30%	40%	
		Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	378 desa	2 unit	-	-	100%	-	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2020 terdapat program/kegiatan sebanyak 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan.

Rencana tindak lanjut jika dalam proses pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka akan dilaksanakan efisiensi dalam penggunaan anggaran dengan mekanisme mengusulkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Tahun 2020 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN :**1. Penjelasan Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program beserta Rumusan Formula**

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan 5 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel.		
Sasaran 5.1: Meningkatkan Desa Berkembang Kabupaten Malang	Jumlah desa berkembang Kabupaten Malang	Jumlah desa berkembang tahun (n) yang menjadi desa maju.
Program 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	$\left[\frac{\sum \text{Desa yang menyampaikan laporan keuangan desa (ADD) tepat waktu}}{\sum \text{Desa yang seharusnya menyampaikan laporan}} \times 100\% \right]$
Program 2 : Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	$\left[\frac{\sum \text{BUMDes yang dibentuk}}{\sum \text{Desa yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$
Program 3 : Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	$\left[\frac{\sum \text{Desa yang memanfaatkan potensi desa (Teknologi Tepat Guna dan SDD)}}{\sum \text{Desa yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$
Program 4 : Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	$\left[\frac{\sum \text{LPMD/K yang dibina}}{\sum \text{LPMD/K yang ditargetkan}} \times 100\% \right]$

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (sesuai E-Renstra Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD)

Indikator Kinerja Utama		Formula	t0	t1	t2	t3	t4	t5
1	Jumlah desa berkembang yang menjadi desa maju	Jumlah desa berkembang tahun (n) yang menjadi desa maju	0	10	4	4	4	4

